

## **Faktor Penyebab Pengangguran dan Kemiskinan serta Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia**

**Reni Sesmita<sup>1</sup>, Wiwit Tri Nolya<sup>2</sup>, Yusi Marsa Heriyandini<sup>3</sup>, Yosi Lara Jenita<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

<sup>1</sup>[renizesmita20@gmail.com](mailto:renizesmita20@gmail.com) , <sup>2</sup>[wiwittrinolya@gmail.com](mailto:wiwittrinolya@gmail.com) , <sup>3</sup>[yusimarsa@gmail.com](mailto:yusimarsa@gmail.com) , <sup>4</sup>[yosilarajenita@yahoo.com](mailto:yosilarajenita@yahoo.com)

### **Abstrak**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua persoalan utama yang saling berkaitan dan menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta jaringan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi, keberhasilan suatu negara diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, minimnya lapangan kerja, serta kondisi geografis yang terisolasi. Krisis ekonomi 1997 dan penurunan konsumsi domestik memperburuk kondisi tersebut, memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan angka kriminalitas. Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ini dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat bantuan jangka pendek. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, penguatan sektor UMKM, serta penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan ekonomi yang inklusif agar masyarakat miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Pengangguran, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Lapangan Kerja, Pemerintah

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu unsur persoalan yang mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Negara maupun di wilayah manapun. Kemiskinan salah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia dan lainya. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan setiap manusia itu beraneka ragam maka kemiskinan pun memiliki banyak unsur primer yang berupa miskin aset dan keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi dan lainnya.

Pembangunan dalam ekonomi merupakan salah satu elemen tujuan utama bagi Negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, Keadilan serta kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA). Pola pembangunan perekonomian maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan dalam ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Pada akhirnya tingkat pengangguran dan kemiskinan pada suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, hal seperti ini jelas mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain- lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial.

Sedangkan Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pembahasan mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, terdapat beberapa temuan penting yang menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, terutama mengingat dampak sosial-ekonomi yang luas. Penyebab utama tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia terdiri dari beberapa faktor mendasar, antara lain: Pendidikan: Kurangnya akses dan rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Pendidikan yang kurang memadai membatasi kemampuan individu untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan; Kesehatan: Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan memengaruhi kemampuan masyarakat miskin untuk bekerja secara produktif. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan produktivitas kerja dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga; Terbatasnya Lapangan Pekerjaan: Ketersediaan pekerjaan yang rendah tidak mampu menampung jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Permasalahan ini diperparah oleh dominasi sektor industri padat modal dibandingkan dengan industri padat karya, sehingga masyarakat sulit mendapatkan kesempatan kerja.; Daerah Terisolasi: Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Minimnya infrastruktur dan kesulitan distribusi menyebabkan biaya hidup meningkat serta hasil produksi pertanian dan perikanan sulit dipasarkan.

Dampak Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, yang berdampak langsung pada lonjakan pengangguran serta penurunan daya beli masyarakat. Dampak krisis ini masih dirasakan hingga saat ini, dengan masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan terbatasnya kesempatan kerja. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Efektif: Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah cenderung berfokus pada bantuan langsung, seperti pemberian beras dan program jaring pengaman sosial. Namun, pendekatan ini hanya memberikan solusi jangka pendek dan belum mampu memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Bantuan langsung hanya memenuhi kebutuhan sesaat tanpa menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Pentingnya Pendekatan Berbasis Pemberdayaan: Pemerintah sebaiknya berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan memfokuskan pada pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya adalah menyediakan pelatihan keahlian yang dapat membantu masyarakat miskin menjadi mandiri secara ekonomi. Program pemberdayaan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi solusi efektif, karena UMKM umumnya dikelola oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Penyediaan Lapangan Kerja dan mobilitas Tenaga Kerja: Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, terutama di sektor padat karya yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja harus didorong melalui program pelatihan ulang agar keterampilan pekerja tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, peningkatan mobilitas modal melalui pemindahan industri padat karya ke wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi dapat membantu mengatasi pengangguran struktural.

Prioritas Kebijakan bagi Masyarakat Miskin: Pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin yang rentan terdampak pengangguran. Kebijakan ini meliputi regulasi yang mendorong investasi di sektor produktif dan padat karya, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara keseluruhan, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, dengan pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor produktif. Pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan masyarakat mandiri yang mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi secara sebab-akibat. Meningkatnya angka pengangguran di masyarakat secara langsung berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan. Dalam tulisan ini, penulis bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan serta bagaimana pemerintah memposisikan diri dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi pukulan besar bagi bangsa ini. Peristiwa tersebut memberikan dampak yang sangat luas dan mendalam, memengaruhi kehidupan masyarakat kala itu hingga berimbas pada kondisi sosial dan ekonomi yang masih dirasakan hingga kini. Dampak krisis tidak hanya dirasakan oleh kalangan miskin, tetapi juga oleh kelas menengah hingga konglomerat. Kenaikan harga barang yang sangat tinggi tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan memicu peningkatan angka kriminalitas. Krisis tersebut juga menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri, yang memicu keresahan sosial dan memperburuk rasa aman di tengah masyarakat. Dalam situasi penuh ketidakpastian itu, masyarakat menaruh harapan besar pada gerakan reformasi sebagai jalan menuju perubahan yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan terus bermunculan. Salah satu contohnya adalah penutupan perusahaan-perusahaan besar asing seperti Panasonic dan Toshiba pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Penurunan konsumsi domestik menjadi alasan utama penutupan tersebut, yang pada gilirannya memperparah tingkat pengangguran dan menambah beban sosial-ekonomi bangsa.

Dan dengan meningkatnya pengangguran membuat tingkat kemiskinan pun menjadi semakin meningkat tajam. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Selain dampak dari krisis ekonomi, terdapat sejumlah faktor lain yang menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi hingga saat ini, antara lain:

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diprioritaskan, karena menjadi fondasi utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Akses pendidikan yang baik memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan keterampilan, serta memperbaiki taraf hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mengakses lapangan kerja yang layak dan berkontribusi pada kemajuan teknologi. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai, terutama di daerah tertinggal.

b. Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah investasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk bekerja secara optimal dan berdaya saing. Sayangnya, masyarakat miskin sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya status gizi, serta sanitasi yang buruk. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas kerja, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta terbatasnya tumbuh kembang anak dari keluarga kurang mampu.

c. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan

Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ketersediaan pekerjaan yang terbatas tidak mampu menyerap jumlah pencari kerja yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran yang berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Kebijakan perluasan kesempatan kerja pun dihadapkan pada dilema: antara kebutuhan untuk menarik investasi di sektor padat karya, dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk jaminan upah dan kepastian kerja.

d. Wilayah Terisolasi

Keterisolasian geografis membuat masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta informasi dan teknologi. Mereka harus menempuh jarak jauh dan medan berat hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar. Minimnya infrastruktur jalan dan jembatan juga menghambat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga produk menjadi rusak sebelum sampai ke pasar. Selain menyebabkan biaya hidup tinggi, kondisi ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperparah kesenjangan wilayah.

Beberapa pengamat sosial-ekonomi berpendapat bahwa kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh pendekatan pemerintah yang terlalu berfokus pada pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sejenis, seperti distribusi beras dan program jaring pengaman sosial (JPS). Meskipun bantuan tersebut bersifat sementara dan dapat meringankan beban masyarakat miskin dalam jangka pendek, namun tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Masyarakat miskin pada dasarnya membutuhkan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

Akan lebih efektif jika pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Dengan peran tersebut, pemerintah dapat lebih objektif dalam mengidentifikasi dan memahami kondisi masyarakat yang terdampak, termasuk melihat mereka sebagai individu atau kelompok yang mengalami disfungsi sosial. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, tetapi juga perlu diarahkan pada pemberian pelatihan keterampilan. Pelatihan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha di lingkungan mereka, yang secara kolektif dapat meningkatkan taraf hidup. Melalui kelompok-kelompok tersebut, diharapkan akan tumbuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal. Kegiatan penyuluhan dan pengembangan UMKM menjadi sangat penting, karena sektor ini menyentuh kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di lapisan ekonomi terbawah. UMKM, terutama usaha mikro, umumnya dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat miskin atau hampir miskin, serta bergerak di sektor informal. Selain itu, penyediaan lapangan kerja menjadi hal yang sangat mendesak dalam mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan mobilitas tenaga kerja, baik secara horizontal maupun vertikal, melalui pelatihan ulang agar mereka memenuhi kualifikasi di tempat kerja baru. Di sisi lain, mobilitas modal juga perlu ditingkatkan dengan mendorong relokasi industri padat karya ke wilayah yang mengalami tingkat pengangguran tinggi. Strategi ini efektif untuk mengatasi pengangguran struktural. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif melalui kebijakan investasi publik dan regulasi yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat miskin yang terdampak langsung oleh pengangguran, menjadikan kepentingan mereka sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

## KESIMPULAN

Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua permasalahan sosial yang saling berkaitan dan menjadi tantangan serius bagi masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki hubungan kausal yang kuat—tingginya angka pengangguran cenderung

mendorong peningkatan tingkat kemiskinan, membentuk siklus yang sulit untuk diputus. Beberapa faktor utama yang memperparah kondisi ini antara lain adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta keterisolasian wilayah. Sayangnya, upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini masih banyak terfokus pada bantuan langsung, yang bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan. Untuk memutus siklus pengangguran dan kemiskinan secara efektif, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator pembangunan—bukan semata sebagai penyedia bantuan dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat secara aktif. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya, merupakan langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Terimakasih kepada dosen dan teman satu kelompok yang telah berpartisipasi dengan baik dan membantu dalam penyusunan artikel ini. Semoga hasil dari artikel ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Naufal, Hotijah, & Putu Siti Firmani. (2024). Kepedulian Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. *Seminar Nasional*, 2 (1). 1-133.
- Sabrina Adzkia, (2021). ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS IV SEKOLAH DASAR (STUDI LITERATUR). *Universitas Pendidikan Indonesia*, 202-212.
- Sidiq, Umar & Moh, Miftachul Choiri. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponogoro: CV. Nata Karya.